

MENGAPA SOSIALISASI TI DI KALANGAN PNS LEMAH?

Wahyudi Kumorotomo

Pertanyaan No.1, No.3: Apakah sinyalemen Brouwer bhw PNS tidak menciptakan rasa aman bagi rakyat, pemalas, kurang inovatif dan korup masih berlaku? Mengapa?

Jawab:

Sinyalemen Brouwer ada benarnya, tapi saya melihatnya lebih karena sistem dan bukan sepenuhnya karena dari dulu manusianya tidak berubah. Ini bukan semata-mata soal stereotip bahwa PNS itu kebanyakan pemalas, kurang inovatif dan korup. Tetapi ini soal iklim organisasi. Pendekatan pemerintah terhadap PNS selama ini keliru sehingga iklim dalam organisasi publik tidak kondusif bagi orang-orang yang mungkin sebenarnya inovatif, kreatif dan punya integritas tinggi. Sudah sejak lama terdapat gagasan untuk mengubah mentalitas PNS dari *pangreh praja* (penguasa) menjadi *pamong praja* (pelindung, pelayan masyarakat). Tetapi ternyata pelaksanaannya nol besar. Pendekatan kekuasaan masih saja diterapkan di semua organisasi publik. Disiplin, apel pagi dan sore, seragam, dsb selalu ditekankan, tetapi tidak ada pengajaran mengapa disiplin itu penting dan apa tugas pokok seorang birokrat pada lembaga pemerintah. Dalam organisasi pemerintah daerah orang lebih menghargai disiplin yang semu tetapi bukan disiplin dalam bekerja, bukan pula kreativitas yang kuat. Ini mungkin disebabkan karena selama ini Menteri Dalam Negeri selalu dijabat oleh figur dari militer.

Terlebih lagi, penilaian terhadap prestasi PNS sering tidak objektif, tidak mengikuti *merit system*. Mekanisme kepegawaian di Indonesia belum memungkinkan kaitan yang erat antara prestasi atau kinerja (*performance*) dengan imbalan (*reward*). Akibatnya, tidak ada insentif bagi mereka untuk bekerja lebih baik. Dulu (th 1990-an) pernah ada gagasan supaya PNS tidak digaji seumur hidup tetapi direkrut berdasarkan sistem kontrak. Setiap lima tahun kontrak itu dievaluasi, dan yang tidak memenuhi syarat tidak lagi diperpanjang kontraknya. Gagasan ini sebenarnya bagus untuk menjamin *merit system*, tapi entah mengapa tidak pernah bisa dilaksanakan.

Rekrutmen PNS yang kolusif juga mengakibatkan jajaran PNS diisi oleh orang yang pemalas, kurang profesional, kurang kreatif. Terus terang, saya termasuk yang sangat tidak setuju dengan kebijakan Menpan melalui surat edaran No. B/1110/M.PAN/6/2005 tahun lalu. Kebijakan itu antara lain memaksakan untuk merekrut pegawai honorer tanpa tes seperti halnya calon PNS lainnya. Kebijakan ini menurut saya merupakan *blunder*. Mengapa? Kita sama-sama tahu bahwa banyak diantara pegawai honorer itu adalah orang-orang "bawaan" dari pegawai yang sudah ada di birokrasi Pemda. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa mereka adalah orang-orang profesional sedangkan masuknya pun tanpa diseleksi? Jadi, dengan kebijakan Menpan itu sebenarnya kita telah kehilangan peluang untuk mendapatkan tenaga muda PNS yang profesional karena sudah terisinya jabatan oleh 650.000 orang yang tadinya berstatus tenaga honorer tanpa seleksi yang memadai.

Pertanyaan No.4: Apakah kecenderungan di atas mengakibatkan sulitnya penerapan TI di lingkungan pemerintahan?

Jawab:

Ya. Pengembangan TI di dalam organisasi pemerintah membutuhkan orang-orang yang berpikiran maju, kreatif, inovatif dan suka dengan tantangan. Kalau *merit system* tidak diterapkan dan iklim organisasi tidak menunjang, bagaimana kita bisa mengharapkan orang-orang yang berkualitas seperti itu?

Pertanyaan No.7, No.8: Kelemahan penerapan TI ada kaitannya dg pendidikan dan cara orangtua mendidik anak-anak kita?

Jawab:

Betul. Pendidikan di SD sampai SMA kita masih belum mementingkan kreativitas. Kurang merangsang peserta didik untuk melakukan eksplorasi, mencoba hal-hal baru, dan keinginan untuk menggunakan pengetahuan bagi peningkatan kualitas hidup (*knowledge-based society*). Misalnya, sejak anak TK, kita sudah dijejali dengan indoktrinasi dan bahwa anak yang pandai itu adalah anak yang duduk manis, pasif, dan penurut. Ini berbeda dengan cara mendidik anak di negara-negara maju, mereka dirangsang kreativitasnya. Contohnya: dalam pelajaran menggambar, kalau ada seorang anak yang menggambar langit dengan warna merah, atau menggambar daun dengan warna cokelat, mereka langsung dibilang "Itu salah!" Di luar negeri, anak bebas menggambar sesuai imajinasi mereka. Kalau anak menggambar langit dengan warna merah, justru Bu Gurunya akan bertanya "Mengapa langitnya di sini merah? Kalau sekarang kita lihat langit kok warnanya biru? Kenapa?" Lalu anak akan cerita sesuai dengan imajinasinya, mengapa langit bisa berwarna merah. Di sinilah awalnya anak dirangsang untuk kreatif dan inovatif. Di Indonesia, belum apa-apa anak-anak sudah disalahkan dan dianggap bodoh. Akibatnya anak-anak yang kreatif semakin sulit dijumpai.

Tetapi saya masih optimis bahwa diantara penduduk Indonesia yang 220 juta masih banyak orang yang kreatif dan inovatif. Olimpiade fisika dan matematika yang banyak dimenangkan anak-anak Indonesia sudah menunjukkan hal itu. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana supaya anak-anak yang potensial ini memperoleh dukungan dari pemerintah. Sekarang ini banyak sekali terjadi anak-anak yang sangat kreatif di bidang IT ternyata kemudian ditawarkan oleh pemerintah Singapura untuk mendapat beasiswa. Setelah mereka lulus, akhirnya memilih pekerjaan di negara itu. Sampai kapan kita akan membiarkan *brain-drain* di bidang IT ini terus berlangsung?

Pertanyaan No.10 dan No.11: Apakah ada terobosan yang bisa dilakukan, apa yang mesti dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah?

Jawab:

Memang masih ada peluang untuk melakukan terobosan. Tetapi, sekali lagi, ini memerlukan komitmen yang sangat kuat dari pimpinan di lingkungan organisasi pemerintah. Menteri di setiap jajaran departemen harus bersedia bekerja lebih keras, jajaran eselon I harus mau turun ke bawah menggerakkan dan menciptakan iklim organisasi yang lebih kondusif. Pelatihan teknis diantara PNS harus difokuskan kepada upaya untuk *problem solving*, bukan sekadar untuk syarat kenaikan pangkat seperti yang selama ini berlaku. Mengenai aplikasi TI, harus dipastikan bahwa semua orang yakin mengenai manfaat TI dalam peningkatan efisiensi organisasi. Selama ini, dalam organisasi pemerintah sebenarnya masih lebih banyak orang yang sengaja menghambat penggunaan TI karena akan mengancam jabatan dan peluang mereka untuk "menjual" berbagai bentuk layanan publik bagi kepentingan pribadi.

Saya melihat bahwa bentuk pelatihan TI yang paling efektif adalah dengan *workshop* dan memantau penerapannya di setiap satuan organisasi pemerintah, bukan hanya melalui interaksi di kelas seperti masih banyak dilakukan. Setiap pelatihan harus diikuti dengan penerapannya, dipantau terus kegiatan masing-masing peserta, dan *action plan* semacam itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Lebih baik melaksanakan satu paket pelatihan aplikasi TI yang dipantau terus kelanjutannya daripada berbagai macam bentuk pelatihan yang biayanya lebih besar tetapi hanya terhenti untuk supaya sekadar tahu saja tanpa aplikasi yang jelas.

Untuk memastikan supaya setiap satuan organisasi pemerintah terisi oleh orang-orang yang profesional di lingkungan Pemda, pimpinan hendaknya tidak ragu-ragu untuk melakukan perampingan. Saya sebenarnya menyayangkan mengapa PP No.8 tahun 2003 tentang SOT (Susunan Organisasi dan Tata laksana) tidak diterapkan secara konsisten oleh para Bupati dan Walikota di daerahnya masing-masing. Resistensi terhadap usaha perampingan dan rasionalisasi pasti akan ada. Tetapi kalau resistensi itu bisa diatasi dan dihadapi dengan baik, dalam jangka panjang manajemen pemerintahan daerah akan menuai hasil efisiensi yang luar-biasa. Birokrasi Pemda akan terisi oleh orang-orang yang terpilih, dan aplikasi TI, mekanisme layanan publik yang baru, atau inovasi apa pun akan lebih mudah diterapkan.

Pertanyaan No.13 dan No.14: Apakah SDM menjadi faktor utama penentu kesuksesan implementasi TI di pemerintahan, apa lagi faktor yang lain?

Jawab:

Jelas. SDM adalah kunci bagi penerapan TI dalam organisasi pemerintah. Tetapi komitmen pimpinan instansi pemerintah juga sangat penting. Harap diingat bahwa tujuan dari penerapan TI adalah efisiensi dan responsivitas yang tinggi dalam pelayanan publik. Jadi, yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana aplikasi TI itu menunjang tujuan efisiensi dan responsivitas tersebut. Tidak ada

gunanya kapasitas teknologi yang canggih tetapi kalau tidak digunakan secara optimal.

Saya melihat kesalahan utama dalam penerapan TI dalam organisasi pemerintahan ialah bahwa masalah akan selesai dengan disediakannya *hardware*, teknologi baru, atau pembelian perkakas baru. Apabila SDM yang ada belum dipersiapkan secara baik untuk mengoptimalkan teknologi baru itu, akan percuma saja biaya besar yang telah dikeluarkan.

Pengembangan SDM yang baik juga akan mengurangi kecurigaan yang berlebihan kepada orang-orang yang punya kompetensi tinggi di bidang TI. Saya punya sekian banyak pengalaman di kalangan Pemda bahwa penguasaan TI justru mengakibatkan konflik yang tidak perlu di dalam organisasi. Di Banjarmasin, seorang Kabag Hukum banyak dimusuhi karena dia punya inisiatif untuk mengemas semua produk Perda dalam format pdf dan menyebarkan kepada semua pihak melalui situs web. Di Jogja, seorang personil PDE yang berusaha meng-update informasi mengenai proses pembahasan APBD dan mempublikasikan rincian mengenai belanja publik justru menghadapi masalah karena dituduh menyebarkan rahasia lembaga. Di kota Medan, seorang pegawai webmaster yang rajin mengotak-atik tampilan homepage supaya lebih komunikatif dan lebih *user-friendly* dianggap hanya asyik bermain-main dengan komputer selama jam kerja dan tidak melaksanakan tugasnya. Webmaster ini akhirnya frustrasi bekerja di Pemda dan akhirnya keluar, tetapi justru berhasil menjadi konsultan TI di banyak lembaga bisnis.

Berkenaan dengan penerapan TI, komitmen pimpinan sangat menentukan. Dukungan dari pimpinan inilah yang dalam banyak kasus justru berpengaruh besar dalam mengembangkan penerapan TI supaya instansi pemerintah lebih efisien. Ini mungkin bukan hanya pada lingkup Pemda, tetapi pada lingkup nasional. Kita masih ingat contoh keberhasilan pengembangan TI dan industri elektronik di Malaysia. Itu bermula karena Mahathir adalah seorang perdana menteri yang masuk kategori *techno-phile*, percaya betul bahwa aplikasi teknologi yang tepat akan mampu memecahkan banyak masalah. Di negara ini ICT berkembang sangat cepat, volume ekspor barang elektroniknya tertinggi di Asia Tenggara, dan semua pegawai di instansi pemerintah tidak canggung lagi dengan penggunaan TI di lingkungan kerjanya. Dulu Habibie terlalu terfokus pada teknologi tinggi pesawat terbang, tetapi yang kurang diperhitungkan adalah bagaimana aplikasi teknologi tingkat menengah yang justru mendukung banyak hal. Teknologi aplikatif elektronika di Malaysia terbukti lebih menguntungkan dikembangkan, dan tentu saja memudahkan pekerjaan dalam banyak organisasi, baik publik maupun swasta.

Indonesia belum terlambat untuk penerapan TI dalam organisasi pemerintah. Tapi sekali lagi, itu membutuhkan komitmen dan perhatian yang serius dari pimpinan di setiap lini organisasi.
